



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
UNIT KERJA : INSPEKTORAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ELIN HERLINA**
2. Jabatan : **INSPEKTUR UTAMA**
3. NHK : **180006**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 257 m2/314 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Bangunan Seluas 30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 519.000.000

1. MOTOR, HONDA SPACY SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 152.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 5.261.427.920**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 8.882.927.920

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 8.882.927.920

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.